

Implementasi Humas Eksternal Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

¹Nurrahmawati, ²Rd. Garcia Oktabela W

^{1,2}*Prodi Public Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹nurrahmawati10@gmail.com, ²raden_garcia@yahoo.com

Abstract. Implementation of Public Relations or PR is around the public relations roles application at the organization / agency / company that has been planned, and organized with the goals are creating and maintaining mutual understanding and mutual trust between the company and it is publics. These objectives can be applied through a variety of activities / programs that provide benefits for company and it is publics related to information disclosure.. This study aims to identify and describe the implementation of PR PSDA fostering good relations with the external publics, namely the press, the government, and the education institution in information disclosure. In a good relationship conducted by PR PSDA to reporter in the information disclosure through a personal contact activities, press releases, and a contingency plan. Good relationship of PR PSDA with Cross Rektoral in the disclosure is to coordinate the activities, invite the Governor, provide assistance, and conduct social activities. Good relationship PR PSDA with Universities in disclosure information through apprenticeship training / job training / vendors, as well as holding seminars World Water Day.

Keywords: *Implementation of Public Relations, External public, Disclosure*

Abstrak. Implementasi Public Relations atau Humas adalah seluruh pelaksanaan dan penerapan peran humas yang terdapat didalam sebuah organisasi/instansi/perusahaan yang sudah terencana, dan terorganisir dengan tujuan menciptakan dan memelihara saling pengertian dan saling percaya antara perusahaan dengan publiknya. Tujuan tersebut dapat diaplikasikan melalui berbagai macam kegiatan/program yang memberikan manfaat bagi perusahaan dan publiknya dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Humas Dinas PSDA membina hubungan baik dengan public eksternal yaitu pihak pers, pihak pemerintahan, dan pihak pendidikan dalam keterbukaan informasi. Dalam hubungan baik yang dilakukan oleh Humas Dinas PSDA kepada pihak Wartawan dalam keterbukaan informasi yaitu melalui bentuk kegiatan pembentukan kontak pribadi, *press release*, dan *contingency plan*. Hubungan baik Humas Dinas PSDA dengan Lintas Rektoral dalam keterbukaan informasi yaitu mengkoordinasikan kegiatan, mengundang Gubernur, memberikan bantuan, dan mengadakan kegiatan sosial. Hubungan baik Humas Dinas PSDA dengan Perguruan Tinggi dalam keterbukaan informasi yaitu melalui pelatihan magang/*job training*/PKL, serta mengadakan seminar Hari Air Dunia.

Kata Kunci : *Implementasi Humas, Publik Eksternal, Keterbukaan Informasi*

A. Pendahuluan

Dalam hubungannya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat menjalankan Public Relations/Humas yang masih bersifat *Method Of Communication* yaitu Humas yang masih dibawah divisi lain atau belum masuk dalam struktural organisasi / institusi yang pada hal ini humas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat lebih dikenal dengan sebutan kehumasan karena masih berada pada Divisi Sub. Bagian Kepegawaian & Umum, sehingga humas belum *State Of Being* (berdiri sendiri). Meskipun Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat sudah termasuk instansi pemerintah yang terbilang besar, tetapi tidak mengurangi aplikasi Public Relations/Humas dalam lembaga, karena yang terpenting dapat menciptakan

komunikasi timbal balik, serta memberikan suatu kebutuhan informasi kepada publik Internal dan eksternal yang berasal dari media. Selain itu Kehumasan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat mempunyai fungsi membangun suatu hubungan yang baik dengan berbagai publik, baik publik internal maupun publik eksternal.

Sama halnya di institusi atau organisasi lain, Humas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki aktivitas yang pada umumnya bertujuan menciptakan citra positif lembaga dan tercapainya suatu saling pengertian dan saling percaya antara lembaga dengan *stakeholder* melalui pendekatan kegiatan atau aktivitas Humas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan yang dilakukan pun tidak se-maksimal kegiatan yang dilakukan oleh Humas yang sudah melembaga (*state of being*). Salah satu penyebabnya karena faktor anggaran biaya, yang menjadi kendala kegiatan khusus bagi kehumasan. Walaupun demikian kehumasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang ada dengan tujuan memberi perhatian lebih kepada citra lembaga.

Salah satu tujuan ke luar public relations adalah “mempererat hubungan dengan orang-orang atau instansi-instansi di luar organisasi/perusahaan (publik), demi terciptanya opini publik yang menguntungkan organisasi/perusahaan itu”, (Rachmadi, 1992:53). Hubungan baik dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi publik luar tidak cukup hanya dengan menyampaikannya saja, tetapi informasi yang diberikan harus berdasarkan fakta, dan kejujuran, karena publik luar mempunyai hak untuk mengetahui keadaan yang terdapat didalam organisasi/perusahaan/instansi. Dalam humas Instansi menggunakan teknik periklanan dan publisitas. “Periklanan dan publisitas dilakukan untuk menyadarkan masyarakat atau khalayak ramai akan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan instansi yang bersangkutan”.(Siswanto, 1992:47)

Implementasi humas dalam perusahaan/lembaga pemerintahan dapat diaplikasikan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi publiknya dengan memberikan informasi mengenai perusahaan melalui berbagai macam kegiatan. Salah satu kegiatan dalam sebuah instansi/organisasi yaitu PR sebagai penyambung lidah antara publik eksternal dengan instansi/organisasi. Tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga merupakan saluran informasi dari publik terhadap perusahaan. Informasi dari publik berupa opini sebagai umpan balik dari informasi yang telah disampaikan perusahaan.

Dinas PSDA merupakan Institusi Pemerintahan yang memiliki tugas sebagai menyampaikan informasi kepada rakyatnya dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah.

Rakyat turut mengawasi tindak-tanduk pemerintah yang, apabila tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, rakyat secara cepat mengeritikinya. Demikianlah, maka lembaga-lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dilengkapi dengan Bagian Humas untuk mengelola informasi dan opini publik. Informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah disebarkan seluas-luasnya, dan opini publik dikaji dan diteliti seefektif-efektifnya untuk keperluan pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan berikutnya. (Effendy, 1987:47)

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat, yang senantiasa menggunakan humas untuk menjalankan hubungan baik dengan berbagai pihak, dengan tujuan memperoleh suatu nilai lebih atau keberhasilan tersendiri atau mendekati pers, dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemberitaan positif. Tetapi lebih dari itu karena Public

Relations mengandalkan strategi yaitu agar institusi atau organisasi dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan badan atau organisasi.

Adapun tugas pokok humas pemerintahan salah satunya yaitu “upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijakan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut...” (Ruslan, 2003:312). Lalu fungsi humas pemerintahan yaitu salah satunya adalah “mengamankan kebijaksanaan pemerintah, memberikan pelayanan, menyebarkan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat...”(Ruslan, 2003:314)

Salah satu kegiatan eksternalnya yaitu tentang keterbukaan informasi kepada publik, khususnya di Dinas PSDA Prov Jawa Barat memiliki suatu keharusan fungsional untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan program-program kegiatan di lingkungan Dinas PSDA Prov Jawa Barat yang terkait untuk disampaikan pada publik internal dan eksternal. Kehumasan merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerja sama dengan pers, media cetak, atau elektronik kegiatan pengelolaan informasi kehumasan di OPD.¹

Meskipun pada Implementasinya kehumasan PSDA masih kurang, selain karena faktor anggaran ternyata kehumasan PSDA masih dipandang sebelah mata. Padahal implementasi humas sangat berpengaruh bagi kesuksesan Dinas. Peneliti menggali implementasi yang terdapat di kehumasan PSDA khususnya hubungan dengan publik eksternal. Setelah digali, peneliti menemukan bentuk kegiatan hubungan kehumasan PSDA dengan publik eksternal diantaranya dengan wartawan, lintas rektoral, dan perguruan tinggi.

Oleh sebab itu, peneliti memilih untuk meneliti Humas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Humas eksternal dengan cara berhubungan baik dengan wartawan, lintas rektoral, dan perguruan tinggi dalam bentuk berbagai kegiatan melalui judul penelitian: “Bagaimana Implementasi Humas Eksternal Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dalam Keterbukaan Informasi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah “Bagaimana Implementasi Humas Eksternal Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dalam Keterbukaan Informasi”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara detail tentang implementasi Humas Eksternal PSDA dalam keterbukaan informasi.

Dari rumusan masalah tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Humas Dinas PSDA membina hubungan baik dengan Wartawan dalam keterbukaan informasi ?
2. Bagaimana Implementasi Humas Dinas PSDA membina hubungan baik dengan Lintas Rektoral dalam keterbukaan informasi ?

¹ Dokumen “Topoksi Humas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat”. Pada tanggal 12 April 2014.

3. Bagaimana Implementasi Humas Dinas PSDA membina hubungan baik dengan Perguruan Tinggi dalam keterbukaan informasi ?

C. Kajian Pustaka

1. Nama : Marcelia Inriani Rombe

Jurusan: Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Tahun : 2013

Judul Penelitian yang dibuat oleh saudari Marcelia adalah “Aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas Dalam Mewujudkan Visi BPKP”. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu Untuk mengetahui dan mendeskripsikan lebih mendalam tentang aktivitas Humas BPKP sebagai mediator dan publisitas dalam mewujudkan Visi BPKP, dan Untuk mengetahui faktor – faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas BPKP sebagai mediator dan publisitas dalam mewujudkan Visi BPKP.

Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini diadakan di kantor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada bagian Humas. Melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil data yang dikumpulkan kemudian dikumpulkan dalam bentuk narasi dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan aktivitas humas BPKP Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan publisitas untuk mendukung terwujudnya visi BPKP sudah baik namun belum maksimal.

Perbedaannya dengan Skripsi saya ini ditunjukkan dari tujuan skripsi Marcelia yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan lebih dalam tentang aktivitas Humas BPKP sebagai mediator dan publisitas dalam mewujudkan Visi BPKP, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas BPKP sebagai mediator dan publisitas dalam mewujudkan Visi BPKP. Sedangkan Skripsi saya bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Humas Eksternal Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dalam Keterbukaan informasi lembaga. Lalu, perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan. Jika saudari Marcelia menggunakan metode deskriptif kualitatif, saya melalui pendekatan deskriptif. Selanjutnya persamaan dari Penelitian saudari Marcelia dan Penelitian saya, penelitian kami sama-sama meneliti bagian Humas Lembaga.

2. Nama : Dewanta Pramayoga

Jurusan : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malang

Tahun : 2012

Judul Penelitian yang dibuat oleh saudara Dewanto yaitu “Implementasi Kode Etik Humas Eksternal dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kode Etik Humas Eksternal dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Empat Instansi Anggota Perhumas Malang Raya.

Dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik wawancara terhadap empat Instansi anggota perhumas malang raya, melakukan observasi, dan dokumentasi langsung ke lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi Kode Etik Humas Eksternal dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada Empat Instansi Anggota Perhumas Malang Raya sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dalam melaksanakannya.

Perbedaan Penelitian saudara Dewanto dengan penelitian saya yaitu saudara Dewanto meneliti tentang implementasi Humas Eksternal yang terfokus kepada kode etik profesi humas dan tentang undang-undang keterbukaan informasi publik yang diterapkan didalam instansi. Sedangkan saya terfokus pada implementasi Humas Eksternal Dinas PSDA dalam keterbukaan informasi lembaga.

Dalam penelitian saudara Dewanto memiliki persamaan penelitian dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama meneliti Humas Eksternal, dan terdapat undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik.

D. Metode dan Sasaran Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Metode Pendekatan dekspritif. Adapun pengertian pendekatan penelitian yaitu “refleksi struktur berpikir yang tersistemasi dalam suatu bentuk atau jenis penelitian yang akan kita lakukan yang kita pandang tepat untuk menjawab ‘rasa ingin tahu’ kita terhadap suatu hal”.(Aslichati dkk, 2010 : 211)

Sasaran dalam penelitian ini yaitu kepada kehumasan PSDA, dan publik eksternal diantaranya wartawan, dan mahasiswa yang sedang magang tentu sasaran penelitian tersebut berkaitan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang terlibat dalam Implementasi Humas Eksternal dalam keterbukaan informasi, dan mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatannya.

E. Temuan Penelitian

1. Implementasi Humas Eksternal Dinas PSDA membina hubungan baik dengan Wartawan dalam Keterbukaan Informasi.

Hubungan baik antara Humas/PR dengan pihak pers adalah suatu peranan humas yang penting, karena Humas tidak lepas dengan pihak pers dalam kaitannya dengan pemberitaan untuk menyebarkan informasi kepada publik. Pers juga termasuk publik yang ada di luar lembaga, sudah kita ketahui bahwa publik adalah sekelompok orang yang berkepentingan, maka pers merupakan publik yang memiliki kepentingan terhadap lembaga. Oleh sebab itu sebagai seorang humas/PR memiliki kewajiban dalam mengatur dan membina hubungan baik dengan pers. “Prinsipnya Press Relations adalah membina hubungan baik dengan orang-orang pers. Disamping membina, seorang PRO juga harus mengatur dan mengembangkan hubungan baik dengan pers dsb”. (Yulianita, 2007:71)

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratu selaku ketua kehumasan PSDA bahwa: “hubungan baik dengan pihak pers adalah kegiatan di mana humas berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pimpinan dengan pihak pers. Setiap wartawan/pers yang memiliki kepentingan berhubungan dengan lembaga maka humas memiliki peranan untuk menjadi wakil pimpinan dalam melayani setiap pers yang berkepentingan.”

Kegiatannya antar humas dengan wartawan baik itu LSM menjembatani wartawan dengan pimpinan atau dengan orang-orang yang ingin di hubungi, misalnya menanyakan mengenai proyek atau misalnya mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di ke PSDA-an.²

² Wawancara dengan Ibu Ratu, 1 September 2014

Berikut ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dari kegiatan humas yang dilakukan oleh Kehumasan PSDA Jabar dalam membina hubungan baik dengan wartawan yaitu pembentukan kontak pribadi, *press release*, dan *contingency plan*.

a. Pembentukan Kontak Pribadi

Pembentukan kontak pribadi merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Humas yang dibina dan diatur terhadap pihak media massa. Kegiatan seorang Humas antara lain membina keakraban dengan media massa secara informal. Hal ini bertujuan agar terjalin hubungan yang baik dan terciptanya keberhasilan hubungan yang didasari dengan kejujuran dan saling pengertian, tidak hanya dari salah satu pihak saja. Berhasilnya seorang petugas dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain (publiknya) ditentukan oleh sikapnya yang ramah, sopan, hormat, menaruh penghargaan kepada orang lain...

Pembentukan dan pembinaan kontak pribadi menjadi dasar pokok pelaksanaan hubungan dengan media. Para pejabat PR sadar bahwa keberhasilan hubungan media tergantung sepenuhnya pada kontak pribadi yang berciri informal. Didasari dengan kejujuran dan saling pengertian. (Rachmadi, 1992:57)

Meskipun pada kenyataannya masih banyak wartawan yang menjadikan profesi sebagai wartawan untuk mencari keuntungan semata dengan mencari kesalahan atau kekurangan yang ada di Dinas, tetapi kehumasan PSDA masih memberikan pelayanan yang baik kepada wartawan-wartawan tersebut. Namun, tidak semua wartawan seperti itu, kali ini peneliti mewawancarai seorang wartawan yang mengerti kode etik yaitu Pak Yoga. Hubungan kehumasan PSDA dengan Pak Yoga berjalan dengan baik, karena terbentuk dari sikap awal yang baik dari kedua belah pihak.

b. *Press release*

Press release merupakan pemberitaan tertulis yang disediakan oleh pihak perusahaan/lembaga untuk para pers yang bertujuan agar dapat dengan mudah di beritakan.

Keperluan untuk pemberitaan/siaran tentang perusahaan melalui *Press release*.

Dalam hal ini kita harus menyangkutkan kepentingan umum sebab persyaratan *Press release* harus menyangkut kepentingan publikasi perusahaan adalah dengan tidak dikaitkan dengan periklanan, oleh karena itu harus memenuhi nilai berita (*news value*). (Yulianita, 2007:7)

Press release harus sesuai dengan gaya berita yaitu singkat, ringkas, dan padat. Karena *press release* akan dikembangkan bahasanya oleh para pers, namun tidak keluar dari apa yang di bahas. Kegiatan atau bentuk cara *press release* dilakukan oleh bagian Humas dalam perusahaan/lembaga tersebut.

Press release adalah siaran/pers/keterangan resmi tertulis dari instansi/perusahaan sesuatu kebijakan, kejadian khusus atau langkah-langkah yang akan diambil oleh instansi/perusahaan, yang sengaja dipersiapkan untuk siaran pers...

bentuk *press release* biasanya singkat, isinya ringkas, padat, memuat hal-hal yang penting saja. Gaya beritanya menyesuaikan dengan gaya pemberitaan pers, untuk memungkinkan berita itu dapat langsung dimuat dalam surat kabar yang bersangkutan.

Ada beberapa ukuran yang dapat dijadikan pedoman teknis, yaitu:

1. Apakah informasi dalam *press release* itu cukup menarik untuk masyarakat luas.
2. Apakah informasi yang diberikan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam masyarakat tentang instansi/organisasi yang bersangkutan.

3. Apakah isi berita sungguh-sungguh bernilai berita untuk dapat mengatasi informasi saingan yang mengalir ke meja redaksi.
4. Apakah informasi yang diberikan itu juga memenuhi kepentingan pers.
5. Apakah publisitas yang dituangkan dalam *press release* sudah mencerminkan situasi dan kegiatan lembaga/organisasi.
6. Apakah *press release* sungguh-sungguh mencerminkan fakta yang berhubungan dengan materi yang dibahas. (Rachmadi, 1992:59)

Berbeda dengan Humas yang terdapat di PSDA tidak diberikan kewenangan untuk membuat *press release*, Ibu Ratu mengatakan *press release* tidak sering atau terbilang jarang dibuat, dan yang bertugas membuat yaitu pimpinan PSDA. Seharusnya membuat *press release* adalah tugas dari Humas, karena Humas yang berhubungan langsung dengan pihak media massa.

Namun, Ibu Ratu mengatakan bahwa *press release* yang dibuat oleh pemimpin sudah sesuai dengan gaya berita, dan sesuai dengan pedoman teknis. Meskipun kenyataannya, peneliti tidak bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk dari *press release* tersebut, karena sangat sulit untuk mendapatkannya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Pak Yoga sebagai wartawan yang pernah menerima *press release* beliau mengatakan bahwa *press release* dibuat sesuai dengan gaya berita dan pedoman teknis.

c. *Contingency Plan*

Contingency plan yang artinya rencana kontingensi, merupakan rencana yang sudah disiapkan atau dirancang ketika terdapat situasi mendadak didalam sebuah perusahaan/lembaga. Dalam kegiatan perusahaan/organisasi/lembaga mungkin pernah terjadi sebuah hal atau situasi yang mendadak, yang sewaktu-waktu melibatkan media massa untuk meliput pemberitaan yang terjadi dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut dan sebagai seorang Humas perlu untuk merumuskan rangkaian kegiatan situasi tersebut.

Untuk menghadapi hal mendadak, yaitu situasi tidak rutin yang sewaktu-waktu melibatkan media massa, misalnya permintaan wawancara dengan pimpinan lembaga/organisasi/perusahaan dan sebagainya, mengharuskan adanya perumusan serangkaian kegiatan penanggulangan sedini mungkin. permintaan wawancara untuk mengadakan wawancara dengan pimpinan lembaga/perusahaan merupakan peristiwa tidak rutin.

Agar diperoleh hasil yang optimal, perlu terlebih dulu dipertanyakan: (a) pengaruh (sirkulasi, popularitas) media massa yang bersangkutan, (b) dampak dan hasil wawancara, dan (c) kredibilitas pewawancaranya. Untuk menghindari salah kutip pada saat wawancara biasanya pimpinan lembaga/perusahaan disertai pejabat *public relations* yang selalu bertindak sebagai narasumber, juga merekam seluruh wawancara. (Rachmadi, 1992:57)

Seperti yang terjadi di Dinas PSDA pernah terjadi sebuah situasi yang mendadak di mana Dinas tersebut sangat dirugikan oleh pemberitaan yang dinyatakan oleh pihak pers. Ibu Ratu mengatakan bahwa pihak pers pernah mendadak demo dan mendadak yang memberikan keterangan terjadi kesalahan dalam proyek dengan memperlihatkan bukti-bukti foto dan meminta untuk dapat mewawancarai pimpinan.

2. Implementasi Humas Eksternal Dinas PSDA membina hubungan baik dengan Lintas Rektoral dalam Keterbukaan Informasi

Sebuah lembaga pemerintah pasti terdapat hubungan dengan lembaga atau pihak pemerintahan lainnya, begitu pula di dalam dinas PSDA pasti mengadakan mitra kerja

dengan lembaga pemerintah lainnya. Karena bermitra dengan lembaga pemerintah juga sangat dibutuhkan demi kelancaran kegiatan kedinasan tersebut.

Contoh Bentuk hubungan Government Relations, antara lain :

- Dalam peristiwa Ulah Kota Bandung misalnya, perusahaan sebaiknya mengucapkan selamat pada Pemda setempat ucapan ini selain memberikan efek yang baik bagi Pemda, sekaligus pula diketahui masyarakat.
- Pengiriman agenda bagi instansi-instansi pemerintah terkait.
- Mengadakan jalur hobby, misalnya dengan mengadakan kesenian, Olah Raga misalnya saja diadakan turnamen-turnamen, mensponsori kegiatan kesenian atau olah raga baik dalam konteks nasional maupun internasional dalam rangka mengharumkan nama bangsa.
- Mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan suatu acara perusahaan.
- Melakukan kegiatan lobby secara baik dengan pihak pemerintah untuk memperlancar suatu kegiatan perusahaan.
- Dsb. (Yulianita, 2007:77)

Berikut adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Humas PSDA dalam berhubungan dengan pihak Pemerintahan lainnya. Dalam hal ini, kehumasan PSDA melakukan koordinasi acara-acara kepada jajaran PU (Pekerjaan Umum), OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya, dan kepada SETDA (Sekertariat Daerah).

Bentuk lain dari membina hubungan kehumasan PSDA dengan lembaga atau pihak pemerintahan lainnya yaitu mengirimkan agenda. Selanjutnya, kegiatan sosial yang diadakan oleh kehumasan PSDA dalam mengikut sertakan atau mengundang pihak pemerintah lainnya seperti kegiatan kerja bakti, membersihkan kali cikapundung, penanaman pohon, donor darah, khitanan missal. Kegiatan tersebut dilakukan ketika Hari Bakti PU.

3. Implementasi Humas Eksternal Dinas PSDA membina hubungan baik dengan Perguruan Tinggi dalam Keterbukaan Informasi

Hubungan dengan pihak pendidikan perlu dibina oleh sebuah organisasi/lembaga, karena pihak pendidikan dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada organisasi/lembaga tersebut, dan memudahkan dalam menjalin kerjasama karena sudah terjalin sebelumnya.

Dalam kegiatan dengan pihak pendidikan, terdapat contoh bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan lembaga kepada bidang pendidikan:

1. Memberikan sumbangan dana untuk pendidikan
2. Memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah
3. Memberikan beasiswa
4. Menjadi bapak asuh bagi siswa berprestasi, dsb.

(Yulianita, 2007:80)

Namun dalam Dinas PSDA bentuk kegiatan dengan bidang atau pihak pendidikan yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi yang ingin praktek kerja lapangan (PKL)/magang/*job training* sesuai dengan jurusan pendidikannya, serta mengadakan seminar mengenai kegiatan Hari Air Dunia kepada mahasiswa Universitas yang ada di Bandung untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

F. Diskusi

Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa terdapat bentuk kegiatan yang dilaksanakan kehumasan PSDA kepada publik eksternal diantaranya dengan wartawan, lintas rektoral, dan perguruan tinggi. Meskipun masih banyak bentuk kegiatan lainnya yang dapat dilakukan kehumasan untuk para publiknya, namun tidak mengurangi tugas, fungsi pokoknya dalam memberikan himbauan dan pelayanan yang baik bagi para publiknya.

G. Kesimpulan

1. Implementasi Humas PSDA kepada pihak pers yaitu kegiatannya menjembatani hubungan antara pimpinan dengan pers. Bentuk kegiatannya yaitu pembentukan kontak pribadi, *press release*, dan *contingency plan*.
2. Implementasi Humas PSDA dilakukan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu mengkoordinasikan kegiatan acara-acara seperti hari bakti PU (Pekerjaan Umum), Hari Air Dunia dengan mengundang jajaran PU, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya, dan kepada SETDA (Sekretariat Daerah), disamping itu mengundang Gubernur untuk meresmikan kegiatan-kegiatan tersebut, memberikan berbagai cinderamata kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan mengadakan kegiatan sosial.
3. Implementasi Humas PSDA dalam membina dan mengatur hubungan baik dengan pihak pendidikan yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai Universitas yang ingin pelatihan magang/*job training*/ PKL, dan mengadakan seminar.